

## Demokrasi dan Kesejahteraan, Antara Cita, Realita dalam Pandangan Islam dan Falsafah Bugis

Lebih dari dua dekade reformasi berjalan, namun gema kalimat Bung Hatta masih terasa relevan. Demokrasi yang diimpikan sebagai jalan menuju kesejahteraan sosial, sering kali hanya menjadi ritual lima tahunan, pesta suara tanpa substansi keadilan.

Sementara itu, rakyat kecil masih menunggu kapan demokrasi memberi arti pada hidup mereka: harga yang stabil, keadilan sosial, dan perlakuan yang manusiawi.

Ekonom politik Jeffrey A. Winters menyingkap sisi gelap dari kekuasaan modern :

“Oligarki adalah politik kekayaan, di mana segelintir orang mampu menggunakan sumber daya ekonominya untuk mengendalikan kekuasaan politik”.

Dalam konteks inilah demokrasi sering kehilangan ruhnya. Kekuasaan tidak lagi menjadi jalan pengabdian, melainkan arena perebutan kepentingan.

Padahal, seperti diingatkan Soekarno dalam Sidang Konstituante tahun 1957:

“Demokrasi bukan hanya memberi kesempatan rakyat memilih lima tahun sekali. Demokrasi harus berarti rakyat berkuasa dalam menentukan nasibnya setiap hari”.

### Demokrasi dalam Cermin Islam

Dalam Islam, konsep yang paling dekat dengan demokrasi adalah syura, musyawarah dalam urusan bersama. Allah berfirman:

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...” (QS. Asy-Syura: 38).

Syura adalah prinsip partisipatif, yang menolak keputusan sepihak dan menuntut keadilan dalam setiap kebijakan. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan hak istimewa.



Oleh  
Irham Ihsan, S.H., M.Si  
Ketua Sompung Lolona  
Cenrana

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil” (QS. An-Nisa: 58).

Rasulullah SAW menegaskan, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, ukuran keberhasilan kekuasaan dalam Islam bukanlah lamanya berkuasa, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.

### Cermin Demokrasi dalam Kerajaan Bugis

Menariknya, jauh sebelum istilah “demokrasi” dikenal luas di Nusantara, masyarakat Bugis telah memiliki

sistem pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai serupa. Kerajaan-kerajaan Bugis, seperti Bone, Wajo, dan Soppeng, tidak berdiri di atas tirani mutlak, melainkan pada asas musyawarah dan hukum adat (ade’).

Dalam Lontarak Akkarungeng, raja bukanlah penguasa absolut, melainkan *to maradeka*, orang merdeka yang diangkat oleh rakyat melalui *ade’* bicara (musyawarah besar bangsawan dan wakil rakyat). Raja hanya boleh berkuasa “*narekko ade’ na bicara mupaja*” selama ia berjalan di atas adat dan keadilan. Jika tidak, rakyat berhak menegur bahkan menurunkannya.

Falsafah Bugis mengenal ungkapan:

“*Ade’ pura onro ri ade’, najaji ri sara’, naparennu ri agama*”.

(Pemerintahan berdiri di atas adat, disucikan oleh syariat, dan diperkuat oleh agama).

Inilah bentuk harmonisasi antara nilai lokal dan nilai ilahi. Dalam konteks modern, sistem itu menggambarkan *checks and balances*, kekuasaan

dibatasi oleh hukum dan moral, bukan semata kehendak pribadi.

Sementara nilai *Siri'* Na *Pesse* menanamkan harga diri dan empati sosial; pemimpin yang tidak punya *Siri'* (malu dan kehormatan) serta *Pesse* (belas kasih kepada rakyat) dianggap tidak layak memimpin.

Konsep ini sejalan dengan pesan Rasulullah: bahwa pemimpin sejati adalah yang memikul penderitaan umat, bukan yang menikmati fasilitas di atas penderitaan mereka.

### Nilai Bersama : Islam, Bugis, dan Demokrasi Modern

Dari Islam dan warisan budaya Bugis, kita belajar bahwa demokrasi sejati bukanlah sekadar prosedur politik, melainkan jalan moral menuju keadilan sosial. Keduanya menolak tirani, baik dalam bentuk kekuasaan tunggal maupun dominasi ekonomi.

Baik syura dalam Islam maupun bicara dalam tradisi Bugis sama-sama menegaskan bahwa kekuasaan harus lahir dari musyawarah dan dijalankan dengan amanah. Demokrasi tanpa moral hanya akan melahirkan oligarki;

kekuasaan tanpa *siri'* akan kehilangan martabatnya.

KH. Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa syura adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam Islam. Buya Hamka menyebut demokrasi yang benar bukanlah suara terbanyak, melainkan tegaknya kebenaran.

Sedangkan Gus Dur melihat demokrasi sebagai jalan menegakkan nilai-nilai Islam: keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

### Menemukan Kembali Ruh Keadilan

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Islam dan kearifan Bugis dapat menjadi fondasi moral bagi demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi tanpa nilai lokal akan gersang; kekuasaan tanpa iman akan menyimpang. Sebagaimana kerajaan Bugis dahulu menjaga keseimbangan antara *ade'*, *sara'*, dan agama, maka negara modern pun harus menegakkan keseimbangan antara hukum, moral, dan kesejahteraan rakyat.



Oleh  
 Irham Ihsan, S.H., M.Si  
 Ketua Sompung Lolona  
 Cenrana

Demokrasi sejati lahir dari nilai-nilai berikut :

1. Syura / Bicara, Musyawarah yang menghargai suara rakyat.

2. Amanah / *Ade'*, Kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab dan aturan

3. Keadilan / *Siri'*, Kepemimpinan yang menjunjung martabat dan keberpihakan.

4. *Pesse* (Empati Sosial), Kepekaan terhadap penderitaan rakyat sebagai inti kesejahteraan.

Demokrasi dan kesejahteraan sejatinya bukan dua tujuan yang terpisah, melainkan satu nafas dalam kehidupan berbangsa. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, sedangkan budaya Bugis menegaskan bahwa kekuasaan tanpa *ade'* na *siri'* akan kehilangan kehormatannya.

Kini, saat demokrasi sering dipertontonkan tanpa substansi, kita perlu kembali kepada akar nilai : keadilan, amanah, dan kemanusiaan. Sebab di hadapan Allah dan sejarah, setiap pemimpin akan ditanya, bukan seberapa besar ia berkuasa, tetapi seberapa adil ia memerintah.

"Demokrasi tanpa kesejahteraan adalah omong kosong.

Kesejahteraan tanpa demokrasi adalah penindasan."

- Mohammad Hatta -